

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI MASYARAKAT KOTA BOGOR PADA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA BOGOR**

**THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL ASSISTANCE POLICY IN THE HOUSE IS NOT LIVABLE COMMUNITY IN THE CITY OF BOGOR IN THE ADMINISTRATION OF THE PEOPLE'S WELFARE THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL CITY OF BOGOR**

**Faisal Tri Ramdani<sup>1</sup>, Nandang Saefudin Zenju<sup>2</sup>, Muhammad Luthfie<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi 1 Bogor, 16720

<sup>2</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi 1 Bogor, 16720

<sup>3</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi 1 Bogor, 16720

**ABSTRACT**

*The implementation of the Social Assistance Policy in the Uninhabitable House Program in the Bogor City Community In the People's Welfare Administration Section of the Bogor City Secretariat has been going well, but still needs to be improved and improved from several aspects of implementation. Especially about the Organizational Environment, which in its implementation found problems related to the implementer. The purpose of the study was to analyze the effectiveness of the implementation of social assistance policies in the Uninhabitable House Program in the Bogor City Community in the People's Welfare Administration Section of the Bogor City Secretariat. The research method used is Mix-method, with data collection techniques using literature studies, and field studies (observations, interviews, questionnaires) which are then analyzed using Weight Mean Score (WMS) analysis techniques. The results showed that in the implementation of the Social Assistance Policy in the Uninhabitable House Program in the city of Bogor, all the main factors and supporting factors for implementing policies synergized well with each other, these aspects started from the successful implementation of policy implementers with aspects of Communication, Resources, Bureaucratic Attitudes or implementers and Organizational Structure One another complements and supports each other so that the effectiveness of the program can be achieved and the community feels positive benefits.*

**Keywords:** *effectiveness and implementation of policy*

### ABSTRAK

Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni Di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu peningkatan dan perbaikan dari beberapa aspek pelaksanaan. Terutama berkenaan dengan Lingkungan Organisasi, yang dalam pelaksanaannya di temukan temuan masalah berkaitan dengan pelaksana. Tujuan Penelitian untuk Menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni Di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah *Mix-method*, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, angket) yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis *Weight Mean Score* (WMS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor seluruh faktor utama dan faktor pendukung pelaksana kebijakan saling bersinergis dengan baik, aspek tersebut dimulai dari pelaksanaan keberhasilan Pelaksana Kebijakan dengan aspek Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi atau pelaksana dan Struktur Organisasi Satu sama lain saling melengkapi dan mendukung sehingga efektivitas program bisa tercapai dan di rasakan manfaat positifnya oleh masyarakat.

**Kata Kunci :** Efektivitas dan Pelaksanaan Kebijakan

## PENDAHULUAN

K Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan Nasional suatu bangsa (Tjokroaminoto & Mustopadidjaya, 1988; Siagian, 1985). Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, tim nasional percepatan dan pengentasan kemiskinan Indonesia telah melakukan berbagai macam strategi pengentasan kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling utama atau kebutuhan primernya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka pemerintah saat ini juga sudah memulai Program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program bantuan sosial yang meliputi pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus/berkala dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pemprov.Jabar menargetkan Rutilahu sebanyak 100.000 unit. Untuk tahun 2017, perbaikan rutilahu di pedesaan dilaksanakan oleh Diskimrum Provinsi Jabar. Adapun

realisasi Rumah Tidak Layak Huni melalui dukungan APBN dalam tahun 2016 di Jabar mencapai 4.000 unit. Perbaikan rutilahu tersebar di 10 Kabupaten masing-masing : Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang dan Pangandaran. Untuk fasilitasi rumah rakyat, program sejuta rumah kembali dilanjut. Di tahun 2016, melalui partisipasi Apersi dibuat rumah susun sebanyak 300 unit. Rusunawa juga direncanakan siap dibangun di beberapa lokasi. Program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan oleh walikota Bogor melalui Peraturan walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan walikota Bogor nomor 15 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dalam pelaksanaannya pembagian bantuan sosial dibagi menjadi dua yaitu bantuan sosial terencana dan bantuan sosial tidak terencana, seperti tercantum pada Peraturan walikota Nomor 28 Tahun 2016 pasal 1 angka 20 yang berisi: Bantuan sosial terencana adalah bantuan sosial yang dialokasikan kepada Individu atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat, penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Serta tercantum juga pada Peraturan walikota Nomor 28 Tahun 2016 pasal 1 angka 21 yang berisi: Bantuan sosial tidak terencana adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi Individual dan/atau keluarga yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 22 dijelaskan pula bahwa Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh Individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dijalankan pemerintahan Kota Bogor sepanjang tahun 2016 masih terdapat sekitar 2600 rumah tidak layak huni (RTLH) yang ternyata belum tersentuh program rehabilitasi dari pemerintah. Tercatat ada 6.974 proposal usulan yang diterima bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setdakot Bogor. Jumlah tersebut berasal dari enam kecamatan se- kota Bogor. Dari 6974 pengajuan tersebut, sebanyak 3910 sudah di evaluasi, sedangkan yang belum di evaluasi jumlahnya mencapai 2001. Dari jumlah yang sudah dievaluasi sebanyak 1063 permohonan tidak dapat dibantu, untuk pengajuan RTLH tahun 2016 lalu, proposal yang sudah masuk dalam penganggaran dan rencana pencairan di tahun 2017 jumlahnya mencapai 2549. Jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan Pemkot Bogor dan untuk sisanya sebanyak 2600 proposal yang sudah diverifikasi masuk daftar tunggu. Tahun ini, terhitung awal Januari sampai awal Februari 2017 Adkesra Setdakot Bogor sudah menerima pengajuan bantuan RTLH sebanyak 1.832 proposal dan diperkirakan, sampai akhir tahun nanti jumlah ini akan terus bertambah. Kedepannya pihaknya berencana akan mengunci target RTLH melalui program RTLH Prioritas, pada awal pelaksanaan kebijakan jumlah bantuan yang di terima pemohon dengan jumlah nominal maksimal berjumlah Rp. 6.500.000, seiring dengan semakin meningkatnya harga bahan baku bangunan pada tahun 2017 pemerintah menaikkan jumlah bantuan nominal maksimal menjadi Rp. 11.200.000 bagi pemohon. Dalam program ini pemkot akan bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan, kemudian kelurahan koordinasi dengan RT /RW setempat untuk mendata di wilayahnya masing-masing, dalam pendataan tersebut akan digunakan indikator yang menyatakan kondisi RTLH seperti rusak berat, rusak ringan dan rusak sedang. Rumah yang rusak berat wajib masuk ke program prioritas untuk penganggaran tahun berikutnya. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan Program yang dicanangkan sebagai bentuk terciptanya

mewujudkan pembangunan Nasional yang nyata, diharapkan dengan berjalannya program ini masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera, mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan makmur., meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan, meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur, memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Masyarakat di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor.
2. Untuk Menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni Di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *Mix-method*, metode ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Abbas, 2010). Sedangkan menurut Creswell (2014) *mix- methods* merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan menurut Johnson dan Cristensen (2007) *Mix-Methods* atau metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan

dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian).

Objek didalam penelitian ini adalah Masyarakat penerima bantuan sosial dalam program rumah tidak layak huni di Kota Bogor. Berdasarkan judul penelitian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, maka variabel penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

Tabel 3.1 Variabel Implementasi Kebijakan

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Implementasi Kebijakan Edwards III (1984: 9-10)	Komunikasi	proses penyampaian informasi	1
		kejelasan informasi	2
		konsistensi informasi yang disampaikan	3
	sumber daya	staf yang cukup (jumlah dan mutu)	4
		Anggaran yang cukup	17
		kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab	6
		fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan	7
	sikap birokrasi atau pelaksana	komitmen sikap pelaksana terhadap program	9,8
		Pemimpin yang tegas	5
	struktur organisasi	standart operation prosedur	10
		Mengatur tata aliran kerja birokrasi	11

Tabel 3.2 Variabel Efektivitas

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
EFEKTIVITAS Martani dan Lubis (1987:55)	Pendekatan Sumber (resource approach)	Perencanaan program	12
	Pendekatan proses (process approach)	Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan	13
		Evaluasi pelaksanaan kebijakan	14
		Dampak kebijakan	15
	Pendekatan sasaran (goals approach)	Manfaat penerima kebijakan	16

Sumber : Teori Efektivitas Martani dan Lubis (1987:55)

Populasi dalam penelitian ini adalah penerima bantuan sosial dalam program rumah tidak layak huni di Kota Bogor berjumlah 2972 pemohon. Dari populasi tersebut ditarik sampel dengan menggunakan sampling insidental yang menentukan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dalam hal ini Penerima Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Selanjutnya untuk mendapatkan besaran jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane dalam Sukandarrumidi (2012) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Populasi

d = Presisi (perkiraan kesalahan yang diperkirakan yaitu 0,1)

Sumber : Yamane dalam Rahmat (1999 : 113)

$$n = \frac{2.972}{2.972 (0.1^2) + 1}$$

$$n = \frac{2.972}{0,2972 + 1} = \frac{2.972}{1,2972}$$

2,291,088 menjadi 230 responden

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel sebanyak 230.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan (Observasi dan Penyebaran Angket dengan mengukur skor jawaban menggunakan skala likert)

Tabel 3.4 Klasifikasi Jawaban Skala Likert

Jawaban	Klasifikasi	Skor
A	Selalu	5
B	Sering	4
C	Kadang-kadang	3
D	Hampir Tidak Pernah	2
E	Tidak Pernah	1

Sumber : Tabel Skala Likert

Teknik analisa data dalam penelitian *Mix-method* data kuantitatif angket menggunakan statistik dalam penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, teknik analisa data penelitian yang digunakan yaitu deskriptif.

Deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Untuk mempermudah analisis data dan penarikan kesimpulan maka disamping

menggunakan perhitungan persentase juga dilakukan dengan menggunakan statistik sederhana yaitu mentransformasikan data kualitatif menjadi data kuantitatif. Cara ini biasanya dengan menggunakan perhitungan *Weight Mean Score (WMS)* yaitu dilakukan pembobotan untuk setiap jawaban pilihan. Dengan pemberian skor tersebut, maka akan diperoleh variasi jawaban yang bergerak 1-5, karena itu interval antara satu kriteria dengan kriteria lainnya yang diperoleh angka sebesar 0,8. Angka ini diperoleh setelah adanya pengurangan dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan dibagi banyaknya alternatif jawaban. Untuk menentukan kriteria penilaian harus dihitung terlebih dahulu interval antara satukriteria dengan kriteria yang lain dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

$$I = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Keterangan :

I = Interval  
 SKT = skor tertinggi  
 SKR = skor terendah  
 V = Jumlah

Hasil penghitungan dari 0.8 dijadikan patokan untuk memperoleh kriteria penilaian. Dari ketentuan di atas, maka kriteria penilaian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kriteria penilaian**

Skor	Kriteria
4,24 - 5,00	Sangat Baik
3,43 - 4,23	Baik
2,62 - 3,42	Sedang
1,81 - 2,61	Buruk
1,00 - 1,80	Sangat Buruk

Sumber: Bakri Siregar (1981;20)

Menurut Bakri Siregar (1981;20) data yang diperoleh dari lapangan lalu diolah berdasarkan jawaban responden melalui angket yang menggunakan rumus WMS:

$$M = \frac{\sum(fx)}{n}$$

Keterangan:

M = Perolehan angka kriteria penafsiran  
 f = Frekuensi jawaban

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor

x = Pembobotan (skala nilai)

$\sum$  = Penjumlahan

n = Jumlah seluruh jawaban responden

Kemudian setelah langkah pertama selesai dilakukan, maka selanjutnya dibuat tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Tabel Frekuensi Untuk Tiap Item**

No	Alternatif Jawaban	F	(x)	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$
1	Sangat Setuju		5		
2	Setuju		4		
3	Netral		3		
4	Tidak Setuju		2		
5	Sangat Tidak Setuju		1		
Jumlah					

Sumber : Bakri Siregar (1981 : 20)

Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor selama enam bulan lamanya terhitung mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI MASYARAKAT KOTA BOGOR PADA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA BOGOR

Dalam pelaksanaan kebijakan program Rumah Tidak Layak Huni terdapat beberapa temuan masalah ataupun hambatan yang ditemui, yaitu :

#### 1. Lingkungan Organisasi

Dalam sebuah kebijakan pasti terdapat pelaksana/implementator didalamnya, bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat kota Bogor di bawah sekretariat daerah merupakan pelaksana tingkat pusat di kota Bogor. Dalam pelaksanaannya bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat kota Bogor berperan sebagai pelaksana pusat yang menjadi

koordinators dari 6 kecamatan di Kota Bogor, dari masing-masing kecamatan terdapat kepala seksi yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, dan kepala seksi tersebut dalam tugas pokok dan fungsinya wajib mengetahui keadaan masyarakat di tiap wilayah administrasinya masing-masing khususnya mengetahui peta wilayah masyarakat berdasarkan tingkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

Temuan masalah pertama berkaitan dengan pelaksana khususnya terdapat pada seksi kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya di beberapa kecamatan masih belum memiliki peta wilayah berkenaan dengan masyarakat yang kurang mampu, sehingga ketika pelaksana pusat akan melakukan *survei* terdapat kesulitan untuk pelacakan dan memakan waktu yang sedikit lebih panjang, karena seksi kesra kecamatan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan lurah, RW dan RT dari masing-masing wilayah.

**2. Status Kepemilikan Tanah**

Status Kepemilikan Tanah merupakan temuan masalah selanjutnya, hal ini berkaitan dengan syarat masyarakat yg ingin mengajukan permohonan bantuan sosial Program Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki bangunan yang berdiri di tanah dengan keterangan kepemilikan nama sendiri, sebagai contoh beberapa masyarakat yang mengajukan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni, namun rumah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tersebut ternyata berdiri di atas lahan perusahaan seperti PT.KAI, PLN ataupun Jasa Marga. Di tinjau dari segi hukum bantuan RTLH tidak dapat diberikan kepada masyarakat tersebut, karena bangunan yg mereka ajukan berdiri diatas tanah yg dikelola badan hukum, karena selain kepemilikan tanah bukan atas nama pribadi, bukan tidak mungkin apabila bangunan tersebut mendapatkan bantuan RTLH beberapa waktu yang akan datang ternyata terjadi pelebaran jalan ataupun hal lainnya yang mengharuskan dilakukan penggusuran terhadap bangunan tersebut, padahal dalam waktu tertentu pelaksana harus melakukan survei ataupun mengecek bangunan yang telah mendapatkan bantuan. Namun apabila ditinjau dari segi kemanusiaan hal tersebut bagaikan buah si

malakama, masyarakat di satu sisi memerlukan bantuan tersebut sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak, namun di satu sisi apabila di berikan bantuan akan muncul masalah baru yang dapat memunculkan sengketa di waktu yang akan datang.

**B. ANALISIS DATA JAWABAN ANKET DALAM VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENGENAI DATA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI MASYARAKAT KOTA BOGOR PADA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA BOGOR**

Variabel	Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Proses Keberhasilan Implementasi Kebijakan Edwards III	Komunikasi	Proses penyampaian informasi	4,05	Baik
		Kejelasan Informasi	4,07	Baik
		Konsistensi Informasi yang disampaikan	4,42	Sangat Baik
	Sumber Daya	Staf yang cukup (jumlah dan mutu)	3,56	Baik
		Anggaran yang cukup	3,10	Sedang
		Kemampuan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggungjawab	4,41	Sangat Baik
		Facilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan	4,09	Baik
	Sikap Birokrasi atau pelaksana	Komitmen sikap pelaksana terhadap program (Penyempitan)	4,12	Baik
		Komitmen sikap pelaksana terhadap program (Pelaksana Lapangan)	4,13	Baik
		Penyempitan yang tegas	4,14	Baik
	Struktur Organisasi	Standart Operational Procedure	3,68	Baik
		Mengatur Tata Aliran Birokrasi	3,96	Baik
Efektivitas Martani dan Lubis	Pendekatan Sumber (Resource Approach)	Perencanaan Program	4,34	Sangat Baik
		Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan	4,02	Baik
	Pendekatan Sumber (Resource Approach)	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	3,96	Baik
		Dampak Kebijakan	4,53	Sangat Baik
JUMLAH		Total Jawaban Responden	68,96	
		$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	4,05	Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Dari Tabel 4.26 menunjukkan Hasil dari data jawaban *questioner* atau angket tentang Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni diperoleh skor rata-rata sebesar .4,05 yang menurut penafsiran berada pada kategori Baik Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor seluruh faktor utama dan faktor pendukung pelaksana kebijakan saling bersinergis dengan baik, aspek tersebut dimulai dari pelaksanaan keberhasilan Pelaksana

Kebijakan dengan aspek Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi atau pelaksana dan Struktur Organisasi

Satu sama lain saling melengkapi dan mendukung sehingga efektivitas program bisa tercapai dan di rasakan manfaat positifnya oleh masyarakat baik dari aspek Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yang dapat di lihat dari segi perencanaan program yang sesuai dengan tempo waktu dan sasaran penerima bantuan, serta Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yang meliputi aspek controlling yang mencakup Pengawasan Terhadap Pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan, serta Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yang dalam akhir proses pelaksanaan kebijakan akan menghasilkan *output* kebijakan berupa Dampak Kebijakan, dan Manfaat Penerima Kebijakan.

### KESIMPULAN

Hasil Penelitian yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor dapat di simpukan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan kebijakan program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor terdapat beberapa temuan masalah ataupun hambatan yang ditemui, diantaranya berkaitan dengan :
  - a. Lingkungan Organisasi, yang dalam pelaksanaannya di temukan temuan masalah berkaitan dengan pelaksana khususnya terdapat pada seksi kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya di beberapa kecamatan masih belum memiliki peta wilayah berkenaan dengan masyarakat yang kurang mampu, sehingga ketika pelaksana pusat akan melakukan *survei* terdapat kesulitan untuk pelacakan dan memakan waktu yang sedikit lebih panjang, karena seksi kesejahteraan dan rakyat kecamatan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan lurah, RW dan RT dari masing-masing wilayah.
  - b. Status Kepemilikan Tanah merupakan temuan masalah selanjutnya, hal ini berkaitan dengan syarat masyarakat yg ingin mengajukan permohonan

bantuan sosial Program Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki bangunan yang berdiri di tanah dengan keterangan kepemilikan nama sendiri.

2. Berdasarkan Analisis angket mengenai Efektivitas pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Masyarakat di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor dapat disimpulkan dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bogor seluruh faktor utama dan faktor pendukung pelaksana kebijakan saling bersinergis dengan baik, aspek tersebut dimulai dari pelaksanaan keberhasilan Pelaksana Kebijakan dengan aspek Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Birokrasi atau pelaksana dan Struktur Organisasi Satu sama lain saling melengkapi dan mendukung sehingga efektivitas program bisa tercapai dan di rasakan manfaat positifnya oleh masyarakat baik dari aspek Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yang dapat di lihat dari segi perencanaan program yang sesuai dengan tempo waktu dan sasaran penerima bantuan, serta Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yang meliputi aspek controlling yang mencakup Pengawasan Terhadap Pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan, serta Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yang dalam akhir proses pelaksanaan kebijakan akan menghasilkan *output* kebijakan berupa Dampak Kebijakan, dan Manfaat Penerima Kebijakan.

### SARAN

Dari hasil penelitian di atas peneliti menambahkan saran sebagai masukan dan rekomendasi bagi pelaksanaan kebijakan di waktu yang akan datang, di antaranya saran berupa :

1. Di harapkan Pendataan masyarakat seharusnya selalu di perbaharui (*Update*) dalam rentang waktu yang sebelumnya telah di tentukan khususnya berkenaan dengan tingkatan ekonomi. Hal ini dilakukan guna hasil pembaharuan data dapat menjadi bahan dalam menentukan sasaran kebijakan yang akan di capai seperti dalam



pelaksanaan kebijakan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan sasaran kebijakan masyarakat yang berada di kalangan ekonomi bawah, ketika data masyarakat telah di perbaharui maka ketercapaian sasaran kebijakan akan tercapai secara maksimal, terdapat temuan di lapangan tepatnya di beberapa kecamatan terdapat temuan data masyarakat pemohon kebijakan yang sudah meninggal namun masih terdata sebagai pemohon sehingga perlu di lakukan perbaharuan data untuk menghindari salah sasaran dalam penentuan sasaran kebijakan.

2. Di harapkan pemerintah dapat menambah jumlah nominal bantuan sosial sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pemohon, karena beberapa masyarakat merasa bantuan sosial yang di dapatkan belum dapat di gunakan secara maksimal dalam merenovasi rumah sampai dengan rampung, sehingga untuk menutupi biaya renovasi yang belum selesai masyarakat pemohon mencari dana tambahan dari pinjaman lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik; Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan. 1989. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : BINA AKSARA
- Nugroho A, Bertens K. 1985. *Realitas Sosial refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-individu masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. ELEX media komputindo.
- Prawironegoro, Darsono. 2010. *FILSAFAT ILMU*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Saefudin Zenju, Nandang. 2008. *Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi dalam Perspektif Idealitas Domestik*. KITA Press: Surabaya.
- Siagian, P.Sondang. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Siagian, P.Sondang. 1990. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Administrasi; Cetakan ke-18*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surjasumantri, Jujun S. 2009. *FILSAFAT ILMU SEBUAH PENGANTAR POPULER*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Toha, Miftah. 2003. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiriawan, IB. 2012. *Teori-teori Sosial dalam tiga paradigma fakta sosial, definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta : Kencana Premadania Group.
- Sumber Dokumen :
1. Prosedur Permohonan Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Surat Keterangan Terdaftar. Sumber Pemerintah Kota Bogor Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat tahun 2017.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Walikota Bogor Nomor 15 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor.
  4. Sosialisasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bogor. Sumber Pemerintah Kota Bogor Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat tahun 2017.